Evaluasi Program Pengurangan Resiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat

Nur Khanif

Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
942019030@student.uksw.edu

Bambang Suteng Sulasmono

Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
sulasmonobambang@yahoo.com

Bambang Ismanto

Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
bambang.ismanto@uksw.edu

ABSTRACT

*This study evaluated the Program of Disaster Risk Reduction (DRR) at SMP Negeri 1 Selo. This type of research was evaluative research with CIPP model which conducted based on Context, Input, Process and Product in the implementation of DRR Program. Data collection techniques were done using interviews, observation, and document study. Data analysis in this study included data collection, data reduction, data display and verification. This study used triangulation to validate the datas. The results showed: (1) in the **Context** of evaluation, the DRR Education Program at SMP Negeri 1 Selo is categorized as good, because it is in accordance with the needs of the school. The school is not only getting support from outside parties, but also having clear goals, backgrounds, and requirements for organizing. (2) In evaluating **Input**, this program answers the needs of school. The number of human resources involved and competent is sufficient. Facilities and infrastructure as well as funds are also adequate. The mechanism that the school has is clear and detailed. Program input is considered good. (3) In the **Process**, most activities (3-5 activities) can be carried out well. Human resources are fulfilled and functioning. Funding is available but inefficient and there is a lack of infrastructure. In general, the implementation has followed the mechanism. The DRR process at SMP Negeri 1 Selo is considered reasonable, (4) In the **Product**, most of the activities in DRR Program were achieved, the knowledge and the skills of school members were significantly improved but the attitude/concern of school members to disasters had not increased significantly and it had a considerable impact. Thus, the products were considered fair. Based on the results of the research, sustainability policy can be taken. The program should be continued with improvements of mechanism especially in the form of scheduling and plan of program sustainability and improvement of infrastructure facilities.*

Keywords: Program Evaluation, Disaster Risk Reduction, CIPP

Article Info

Received date: 30 Maret 2021

Revised date: 26 April 2021

Accepted date: 21 Juni 2021

PENDAHULUAN

Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan terhadap bencana penting bagi sekolah di Indonesia dengan program pendidikan kebencanaan. Beberapa program yang dikembangkan antara lain Sekolah Siaga Bencana (SSB), Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Sekolah (PRBBS), dan Sekolah Ramah Anak (SRA) (Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011:10). Penerapan sekolah siaga bencana juga dikembangkan sebagai Sekolah Aman (Triyono, dkk, 2012) Program dengan nama-nama yang berbeda di atas sebenarnya adalah program yang sama yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga sekolah dalam menghadapi bencana. Program-program tersebut dilandasi oleh satu pemikiran bahwa sekolah merupakan lembaga yang efektif dalam rangka mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, dengan memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana (Astuti, S. I., 2010). Jadi sekolah adalah wahana yang penting untuk pendidikan kebencanaan.

Upaya menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan kewajiban setiap sekolah. Menurut Triyono, dkk (2013, p. 2) keputusan menjadi SSB dapat berasal dari keinginan internal sekolah maupun pihak eksternal yang memiliki program membangun sekolah siaga bencana. Sekolah diharapkan dapat menerapkan program SSB, PRB berbasis sekolah ataupun Sekolah Aman secara mandiri. Upaya mewujudkan SSB juga sejalan dengan upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam SNP ditentukan bahwa sekolah harus mampu memberikan kenyamanan, rasa aman bagi warga sekolah. Oleh karena itu sekolah wajib sekolah menyediakan lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Usaha yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan serta pendidikan

tanggap bencana kepada seluruh warga. Disimpulkan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah adalah kewajiban sekolah sekaligus tuntutan SNP. Maka program ini seharusnya muncul dari manajemen internal sekolah masing-masing.

Kabupaten Boyolali sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB), melaksanakan program PRB secara serentak pada tahun 2017. Fokusnya ke beberapa sekolah di wilayah KRB termasuk SMP N 1 Selo. Program ini bernama Program Pengurangan Risiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA). Program ini mendapat pendampingan dari PMI Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan kegiatan dan bantuan *funding* (pendanaan) dari Palang Merah Amerika (*American Red Cross*).

Secara geografis SMP Negeri 1 Selo terletak di pertemuan lereng gunung Merapi dan Merbabu. Dengan kondisi geografis tersebut, sekolah ini memiliki ancaman utama tanah longsor dan erupsi gunung Merapi. Sekolah belum dapat melaksanakan rangkaian kegiatan program PRB secara mandiri setelah akhir pendampingan.

Telah dilakukan sejumlah penelitian tentang PRB dengan pendekatan dan metode yang berbeda-beda. Penelitian berjudul *Continuing Education in Disaster-Affected Schools in Bangladesh: An Evaluation of the Education in Emergencies Project* oleh Akram, et al (2012), menunjukkan sulitnya memenuhi syarat menjadi Sekolah Siaga Bencana yang dibangun pihak eksternal karena harus dengan kualifikasi tertentu. Penelitian Amri, et al (2017) berjudul *Disaster Risk Reduction Education in Indonesia: Challenges and Recommendations for Scaling Up*, menemukan masalah terkait kebijakan pendidikan DRR (*Disaster Risk Reduction*) di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran guru dan sulitnya mengakses materi; rendahnya kemampuan guru untuk melaksanakan pendidikan DRR di sekolah; minimnya kemitraan antara sekolah dan pemangku kepentingan lainnya; kurangnya

platform bagi guru dalam berbagi pengalaman, keberhasilan, dan tantangan; kualitas dan kuantitas personel dan anggaran; serta rendahnya partisipasi anak dalam DRR. Sedangkan penelitian Aprilin, dkk (2018) kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana banjir di SDN Gebangmalang menemukan bahwa sikap, tindakan dan persepsi guru terhadap resiko bencana banjir banyak yang negatif disebabkan kurangnya mengikuti pelatihan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Apronti, P.T., et al (2015) dalam penelitian berjudul *Education for Disaster Risk Reduction (DRR): Linking Theory with Practice in Ghana's Basic Schools*, menemukan kurangnya kemampuan guru karena minimnya keterbukaan akses pelatihan PRB. Aprilin, dkk (2018) menambahkan pentingnya unsur orang tua dalam membentuk kesiapsiagaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan seseorang adalah latar belakang pendidikan, usia dan kegiatan pelatihan/penyuluhan yang pernah diikuti. Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Wajib Latih dan Gladi Lapang Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Merapi oleh Renatama (2017) memberikan kesimpulan bahwa pelatihan kebencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di KRB. Temuan di atas menunjukkan perlunya penyesuaian tindakan pelatihan serta pentingnya peran guru. Pengetahuan dan ketrampilan guru berpengaruh pada kesiapsiagaan siswa. Pelatihan siaga bencana efektif apabila disesuaikan dengan kerentanan wilayah. Disamping peran guru, peran orang tua juga sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan siswa.

Suharsimi, A (2013, p. 57) menyatakan bahwa program “kegiatan besar” sangat baik dievaluasi agar memperoleh data sebagai masukan dan perbaikan. Program PRB adalah program besar di SMP Negeri 1 Selo. Kegiatan evaluasi setelah berakhirnya pendampingan sangat strategis untuk mengukur ketercapaian tujuan, serta menjabarkan uraian kegiatan

dalam program PRB sehingga lebih mudah dilaksanakan. Penting juga untuk mengungkap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sebagai masukan bagi sekolah menuju kemandirian. Dari evaluasi sekolah akan mempunyai pedoman dalam menjalankan program melalui manajemen PRB berbasis sekolah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi program Pengurangan Resiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA) di SMP Negeri 1 Selo dengan menggunakan model CIPP.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan model evaluasi CIPP yang berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan pada konteks, masukan, proses dan hasil. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Selo yang beralamat di jalan Ki Hajar Saloka Km.1 Gebyog, Selo, Boyolali pada bulan Oktober tahun 2020 sampai Januari tahun 2021. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Koordinator Program, para guru, siswa, Tim Pendamping PMI dan Tim Sibat. Dari subyek penelitian informasi diperoleh melalui wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau tidak terstruktur mengambil perwakilan dari tiap tingkatan. Data-data mengenai kesepakatan kerja sama, SK penyelenggaraan, komitmen sekolah, jadwal penyelenggaraan kegiatan, rencana program, pemetaan dan SOP diperoleh melalui studi dokumen. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif. Data yang ingin diperoleh dengan teknik observasi adalah kondisi geografis dan fisik sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana tanggap bencana dan tindakan kesiapsiagaan yang dilakukan di sekolah.

Untuk validasi data digunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk pengumpulan data penelitian terkait dengan

program PRB dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan untuk mengkroscek hasil wawancara antar subyek penelitian. Kroscek juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen pendukung. Teknis analisis data menggunakan model Miles & Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah kriteria kualitatif tanpa pertimbangan. Setelah dikaji melalui beberapa kriteria maka diambil kesimpulan untuk menilai keberhasilan serta kelemahan implementasi program sehingga muncul rekomendasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Context Program Pengurangan Resiko Bencana

Program PRB di SMP Negeri 1 Selo didorong oleh berbagai latar belakang pemenuhan kebutuhan sekolah dan tempat tinggal di KRB. Kecamatan Selo adalah KRB dengan beberapa ancaman meliputi erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, serta kebakaran hutan. Berdasarkan Peta KRB Gunung Merapi Jawa Tengah dan DIY, beberapa desa di Kecamatan Selo yang masuk dalam KRB III yaitu Tlogolele, Klakah, Jrahah dan KRB II yaitu Lencoh, Suroteleng dan Samiran. Dari data peserta didik dan data tenaga pendidikan terdapat 274 atau 55,13% peserta didik juga 6 guru dan karyawan tinggal di KRB Gunung Merapi. Bencana tanah longsor juga sering terjadi hampir terjadi di seluruh wilayah karena lereng yang curam >25 %, curah hujan yang tinggi, dan runtuhnya material. Faktor manusia juga menyebabkan ancaman tanah longsor dengan adanya kegiatan pemotongan lereng, tambang pasir dan pemanfaatan area lahan di lereng curam. SMP Negeri 1 Selo juga terletak di lahan curam dengan kemiringan rata-rata 70°. Sekolah

menerapkan sistem terasering, pondasi yang tinggi pada bangunan dan tanggul untuk mengantisipasi kerawanan tanah longsor. Kebutuhan yang mendasari penerapan program PRB di SMP Negeri 1 Selo yaitu: (1) Adanya berbagai bentuk ancaman bencana di wilayah tersebut, (2) Perlunya peningkatan kesadaran warga sekolah terhadap masalah kebencanaan (3) Adanya kesamaan pandangan antara PMI Kabupaten Boyolali tentang PRB (4) Pentingnya pengetahuan kebencanaan bagi warga sekolah (5) Usaha pembentukan kader relawan di KRB, dan (6) wujud tanggung jawab sekolah untuk layanan pendidikan yang aman dan nyaman.

Program PRB diharapkan dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan SMP Negeri 1 Selo. Program PRB mengacu pada keinginan internal dan inisiator eksternal yaitu PMI Kabupaten Boyolali. Program PRB memiliki dasar pelaksanaan secara resmi dari pemerintah tentang pengarusutamaan PRB di sekolah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2015) juga sudah menerbitkan panduan tentang Sekolah Aman Bencana (SAB) Melalui Peraturan Kepala BNPB No.4 tahun (2012) tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana. Dasar pelaksanaan terbaru adalah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, 2019) tentang penyelenggaraan program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana). Program PRB memiliki panduan teknis dari berbagai pihak terkait. BNPB sebagai garda utama Penanggulangan Bencana Nasional milik pemerintah menerbitkan teknis penyelenggaraan SAB. Sedangkan PMI merupakan lembaga independen non pemerintah secara teknis PMI memberikan bimbingan berupa panduan secara runtut tentang pelaksanaan program PRB, sehingga sekolah pantas untuk diberi label SSB. PMI juga memberikan bantuan pendanaan bagi

program PRB di SMP Negeri 1 Selo. PMI memiliki kriteria menunjuk sekolah binaan dengan memandang sekolah yang berada di KRB. Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh sekolah antara lain : (1) sekolah rawan dan dekat dengan sumber bencana, (2) memiliki komitmen untuk melaksanakan program PRB dan (3) adanya SDM yang kompeten dalam manajemen kebencanaan.

Implementasi program PRB di SMP Negeri 1 Selo adalah: a). membekali pengetahuan kesiapan menghadapi bencana, b). memberikan ketrampilan kesiapan menghadapi bencana dan c). Menumbuhkan rasa tanggap dan sikap peduli terhadap kebencanaan. Visi dan misi sekolah belum secara jelas adanya menerapkan program PRB. Ditemukan label resmi dari PMI sebagai Sekolah Aman Siaga Bencana. Keterkaitan Visi dan Misi sekolah dengan program PRB dimunculkannya masalah kepedulian terhadap lingkungan. SMP Negeri 1 Selo mempunyai visi “Terwujudnya Generasi Yang Religius, Berbudi Pekerti Luhur, Cerdas, Terampil dan Peduli Lingkungan Hidup “. Peduli lingkungan merupakan salah satu cara menerapkan program PRB.

Input Program Pengurangan Resiko Bencana

Kegiatan dalam program PRB meliputi tiga komponen pokok meliputi: (1) Pemahaman aspek kebijakan, (2) Kesiapsiagaan, dan (3) Pelaksanaan Aksi Simulasi Bencana. Dari ketiga komponen tersebut dijabarkan dalam kegiatan sosialisasi program PRB, pembentukan Tim Siaga Bencana, mengadakan pelatihan SSB dan PRB, pemetaan risiko bencana, penyusunan SOP penanggulangan bencana dan pelaksanaan simulasi bencana.

Kegiatan PRB di SMP Negeri 1 Selo melibatkan personil internal dan eksternal. PMI Kabupaten Boyolali mendampingi semua pelaksanaan kegiatan dalam program PRB. Ditemukan pula keterlibatan Tim Sibit yang berfungsi sebagai tenaga terampil dari

masyarakat sekitar binaan PMI Kabupaten Boyolali. Dari semua SDM, Tim Siaga Bencana Sekolah adalah bagian terpenting sebagai peran utama pada pelaksanaan kegiatan PRB.

Dalam tahap perencanaan, pembiayaan program dirancang dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada pelaksanaannya program PRB di SMP Negeri 1 Selo mendapatkan bantuan dari pihak PMI dengan akomodasi sosialisasi, pelatihan sampai dua kali simulasi bencana. Jadi ada perbedaan dari perencanaan penganggaran dan realisasinya dilihat dari sumbernya. Jadi dana yang dibutuhkan dalam program PRB di SMP Negeri 1 Selo dapat terpenuhi dari berbagai sumber.

SMP Negeri 1 Selo memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program SMP Negeri 1 Selo memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan antara lain: (1) UKS sebagai posko kesehatan sekolah (2) Kotak P3K dan obat-obatan penting (3) papan petunjuk dan jalur evakuasi (4) peta dan jalur evakuasi/ penyelamatan (5) peralatan evakuasi atau penyelamatan (6) peralatan sistem peringatan bahaya dan (7) mading dan poster tentang kebencanaan. Ada beberapa kekurangan yang semestinya segera diperbaiki. Sebagian bangunan gedung sudah dalam kondisi rusak berat dan beberapa rusak sedang. Sekolah masih memerlukan fasilitas lain yang belum terpenuhi untuk keamanan. SMP Negeri 1 Selo memiliki lahan yang cukup luas. Kantor guru dan administrasi berada pada posisi depan, sedang kelas-kelas berada pada posisi berbanjar ke belakang. Hal ini menjadikan pemantauan terhadap aktifitas siswa terutama diluar jam pembelajaran kurang maksimal. Maka dari itu sangat diperlukan adanya CCTV.

Perencanaan melibatkan pihak terkait yaitu unsur manajemen sekolah, para guru, pihak pendamping dari PMI dan juga para siswa. Sosialisasi juga dilakukan secara menyeluruh ke semua *stakeholder* dan pihak terkait pendukung program. Sedangkan

mekanisme pelaksanaan program dirinci sebagai berikut :

- 1) PMI membantu sekolah dalam bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan PRB meliputi : (a) penyediaan SDM yang berpengalaman sebagai pelatih, (b) penyediaan sarana penanggulangan bencana, (c) penyediaan akses informasi bencana.
- 2) Sekolah memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang ancaman yang ada di lingkup sekolah dan wilayah sekitar sekolah.
- 3) Membentuk tim koordinasi sebagai tim pelaksana program PRB yang terdiri dari pihak institusi sekolah dan PMI kabupaten Boyolali.
- 4) Tim Koordinasi menyusun perencanaan waktu dan akomodasi untuk pelaksanaan enam pola kegiatan sesuai acuan dari PMI.
- 5) Menyusun teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan program PRB mengacu pada kesepakatan bersama. Pelaksanaan kegiatan dalam program secara umum berdasarkan poin-poin yang dalam perjanjian kerjasama antara sekolah dan PMI tidak ditemukan jadwal secara rinci yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan dalam program PRB tersebut.

Process Program Pengurangan Resiko Bencana

Sosialisasi program PRB ditujukan kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Sekolah membuat pernyataan tertulis antara lain: (1) tentang adanya program sekolah yang mendukung upaya PRB di sekolah, dan (2) tentang rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang mendukung upaya PRB di sekolah. Pengintegrasian penerapan sekolah aman bencana kedalam RKAS adalah melalui kegiatan PMR. Dipastikan PMR masuk dalam kegiatan dan mendapat anggaran dari sekolah.

Sosialisasi pada tahap awal disampaikan pada saat apel pagi bersama secara masal. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, disampaikan pemberitahuan kepada Komite Sekolah dan mengundang komite untuk melakukan koordinasi. Pada tahap berikutnya, sosialisasi dilaksanakan secara lebih spesifik dan terfokus, yaitu kepada guru/karyawan dan kepada siswa. PMR melakukan sosialisasi di dalam kelas. Sedangkan bagi para guru/ karyawan secara umum dilakukan oleh guru yang sudah terlatih. Sosialisasi menggunakan media gambar atau poster kebencanaan tentang bencana gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor. Dijelaskan pula bentuk kesiapsiagaan apa saja yang diperlukan dalam menghadapi masing-masing bencana tersebut.

Sosialisasi program PRB dapat berjalan baik dengan adanya faktor-faktor pendukung antara lain : (1) tersedianya SDM baik dari guru maupun dari siswa yang sudah terlatih, (2) antusias warga sekolah terhadap PRB, dan (3) dukungan dari kepala sekolah. Muncul beberapa hambatan dalam sosialisasi berasal dari kesulitan para siswa menangkap maksud dari program PRB. Permasalahan tersebut diatasi dengan penjelasan berulang-ulang dan penuh kesabaran. Tim Sibit berperan sebagai nara sumber untuk menjawab pertanyaan dari para siswa. Adanya pihak luar yang ikut masuk ke dalam kelas juga bermanfaat meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti kegiatan.

PMI sebagai inisiator menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Sekolah tentang program PRB. Dengan tanggapan positif kepala sekolah terbentuk sebuah kesepakatan pelaksanaan program. Perwakilan PMI, Sekolah dan Tim Sibit membentuk tim koordinasi untuk merintis program. Sebagai tindak lanjut tim koordinasi adalah membentuk Tim Siaga Bencana SMP Negeri 1 Selo.

Gambar 1. Tim Siaga Bencana SMP Negeri 1 Selo

Dasar penempatan personil adalah pemerataan, fungsi dalam manajemen di sekolah dan kemampuan personil. Kegiatan berjalan dengan baik terlihat dari terpenuhinya personil. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya persyaratan yang ketat untuk menjadi Tim Siaga Bencana. Setelah semua personil dalam Tim Siaga terpenuhi, maka diterbitkan SK Kepala Sekolah. Proses pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah berjalan sesuai perencanaan dan tidak ditemukan hambatan. SDM dalam kegiatan ini telah melakukan tanggung jawab masing-masing dan dapat dinilai fungsional.

Kegiatan pelatihan diikuti para guru/karyawan dan anggota. Tim PMI dibantu oleh tim Sibat berfungsi sebagai fasilitator. Pelatihan berbentuk *workshop* dengan tuntutan produk berupa rangkuman potensi ancaman dan kerentanan sekolah. Para peserta pelatihan mendiskusikan berbagai ancaman di sekolah. Masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi dengan spidol dalam sebuah kertas plano besar dan kertas tempel warna-warni kemudian mempresentasikannya. Tim PMI memberi masukan terhadap hasil diskusi dan

merangkumnya menjadi rencana aksi tingkat sekolah.

PMR yang tergabung dalam tim P3K mendapatkan pelatihan teknik evakuasi dan pertolongan pertama. Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelatihan dipenuhi PMI diluar bantuan umum kepada sekolah. Hal tersebut mengoptimalkan pemenuhan sarana kegiatan. Kegiatan pelatihan terlaksana dengan baik dan mampu mengoptimalkan partisipasi para peserta sebagai target pelatihan. Tim Pendamping PMI dan Tim Sibat berfungsi dengan baik. Setiap ada kendala dalam diskusi Tim Pendamping PMI memberikan masukan sebagai solusi. Jadi SDM dinilai sudah berfungsi baik, sarana prasarana dan dana sangat mencukupi bahkan dapat dikatakan melebihi kebutuhan.

Dilakukan penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah terhadap ancaman bencana. Penilaian tersebut meliputi : 1) identifikasi hazard / ancaman, 2) Identifikasi Masalah, dan 3) Identifikasi kerentanan dan kapasitas. Identifikasi *hazard* / ancaman membuat perincian tentang ancaman di sekolah berdasarkan lokasi yang dinilai rawan.

Kegiatan pemetaan dilakukan oleh Tim Siaga Bencana dan anggota PMR. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan didampingi oleh Tim Sibat. Tim Sibat berperan sebagai tenaga terampil yang memberikan pengarahan dan koreksi. Kegiatan lain yang dilakukan adalah penentuan titik koordinat rawan bencana di lingkungan sekolah untuk mengenal secara riil daerah rawan untuk selanjutnya dibuat jalur evakuasi yang tepat menuju titik kumpul. Titik kumpul harus dicatat koordinatnya agar mudah bagi tim untuk memberi pertolongan maupun meminta pertolongan dari pihak eksternal. Pelaksanaan pemetaan resiko tidak memiliki hambatan yang berarti, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang umum dilakukan seperti kegiatan diskusi yang lain. Secara teknis mengalami kesulitan dalam memadukan informasi dari

para peserta. Dalam mengatasi permasalahan di atas, kegiatan sangat memerlukan sikap kooperatif dari para peserta.

Untuk menghadapi bencana secara langsung, ditetapkan SOP yang mengatur peran warga sekolah. SOP juga sebagai dasar pelaksanaan simulasi bencana. SOP yang disusun mempunyai kesamaan dengan penanggulangan bencana dalam masyarakat. Penyusunan SOP melibatkan Tim Koordinasi. SOP mencakup kegiatan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Bagian isi dari SOP meliputi dua bagian utama yaitu : 1) Analisis Ancaman Kapasitas Kerentanan Dan Resiko Bencana dan 2) Tugas dan Tanggung Jawab. Penyusunan SOP berjalan baik karena kesiapan data pendukung, kemampuan personil dan dukungan Kepala Sekolah.

Tabel 1. SOP TANGGAP BENCANA

NO	PERSONIL	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
1	KS	Mengkoordinasi dgn warga sekolah dan Komite Sekolah tentang Program Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah. Peninjauan lokasi rawan bencana Membuat Skala Prioritas Terhadap resiko bencana Sosialisasi Terhadap resiko bencana kepada warga sekolah	Memberikan laporan data korban pada pihak yang berkepentingan Memberikan komando perintah evakuasi Membunyikan tanda-tanda agar warga sekolah berkumpul	Melakukan Pendataan Ulang warga sekolah Melaporkan kejadian bencana kepada dinas pendidikan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi
2	Guru	Memberikan pelatihan tentang resiko bencana disekolah. Memfasilitasi cara penanganan bencana erupsi merapi Mengetahui Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Mengkoordinasi siswa supaya berkumpul dititik kumpul Berkordinasi dengan kepala sekolah Segera mengungsi apabila sudah ada perintah dari badan yang berwenang	Melakukan pendataan terhadap siswa Pemulihan psikologi murid Membersihkan lingkungan sekolah bersama warga sekolah
3	Guru Olah Raga	Melatih fisik team evakuasi Melatih mental team evakuasi	Mengarahkan evakuasi ke titik kumpul Memberikan Petunjuk Pertolongan Pertama.	Membantu penanganan korban
4	Satpam ,TU dan penjaga sekolah	Selalu siap terhadap ancaman bencana. Menginformasikan tanda peringatan bahaya kepada warga sekolah Mengamankan asset sekolah	Membantu mengamankan barang-barang sekolah. Membantu mengidentifikasi jalur evakuasi.	Membantu guru dalam mengidentifikasi korban.
6	Kantin	Menyiapkan kantin yang bersih dan sehat Menyiapkan personil yang akan menyediakan makanan	Menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi korban bencana di Sekolah. Menyediakan tempat pengambilan makanan dan minuman	Melaporkan kegiatan pada guru Membersihkan sampah atau puing puing bekas bencana di sekitar kantin
7	Penjaga perpustakaan	Siaga akan terjadinya bencana	Membantu mengevakuasi korban yang berada di perpustakaan	Menyediakan tempat tempat tertentu untuk menampung korban
8	PMR	Melakukan sosialisasi kepada teman Mengadakan pelatihan dan simulasi Menyiapkan diri dengan mental da fisik	Mengevakuasi siswa Menjalankan hasil latihan PMR	Membersihkan sisa puing puing bencana Membantu untuk menghilangkan trauma
9	Pramuka	Menghimbau siswa agar selalu waspada	Membantu PMR mengevakuasi korban	Memberikan persiapan konsumsi korban
10	Siswa	Mengikuti Sosialisasi PRB	Mengikuti jalur evakuasi yang telah disiapkan Tidak panik	Membersihkan puing - puing bencana yang ada di sekolahan
11	OSIS	Mengadakan sosialisasi PRB	Mengintruksikan kepada anggota PMR dan PRAMUKA	Membantu mencari sumbangan untuk korban

Dokumen SOP Pengurangan Resiko Bencana SMP Negeri 1 Selo

Simulasi dilakukan sebanyak dua kali selama masa pendampingan dari PMI. Warga sekolah merupakan pelaksana sekaligus pihak yang rentan terhadap ancaman. PMI dan tim Sibit adalah pendamping dalam kegiatan namun bukan pihak yang rentan. Sedangkan aparat Polsek Selo dan Puskesmas Selo sebagai pihak eksternal yang berperan sebagai pendukung pelaksanaan dan pemberi bantuan. Simulasi dilakukan berdasar SOP yang dijabarkan dalam sebuah skenario.

Sarana prasarana tanggap bencana di SMP Negeri 1 Selo telah lengkap dengan adanya alat penanda bahaya berupa sirine, lampu *hazard*, speaker, panah penunjuk arah evakuasi dan plank penanda titik kumpul yang telah terpasang dengan baik. Pembiayaan kegiatan simulasi terfokus pada pengadaan konsumsi bagi seluruh peserta yang dipenuhi oleh PMI. Satu kegiatan simulasi dilakukan sebanyak dua kali dengan diberi jeda waktu istirahat. Semua yang ada dalam skenario sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan simulasi tidak dapat maksimal. Hal tersebut terkait dengan keseriusan para siswa dalam melakukan simulasi dan kurang berfungsinya alat penanda. Semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik oleh para pengelola program dengan mengadakan evaluasi pelaksanaan serta perbaikan peralatan pada saat istirahat. Simulasi dapat berjalan sesuai perencanaan karena pelaksana kegiatan memenuhi peran masing-masing sesuai SOP dan mengikuti skenario. Simulasi masih memerlukan perbaikan dalam penambahan skenario untuk jenis bencana yang lain.

Produk program PRB

Tujuan utama program PRB adalah peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan sikap/kepedulian terhadap resiko bencana. Melalui sosialisasi yang dilakukan memberikan peningkatan terhadap

pengetahuan dan pemahaman tentang bencana. Dari pemahaman tersebut telah didapatkan komitmen kuat warga sekolah untuk melaksanakan program PRB. Keberhasilan dari penyelenggaraan program PRB di SMP Negeri 1 Selo adalah kewaspadaan diri dan lingkungan. Wujud dari kewaspadaan tersebut antara lain: 1) dengan pengetahuan dan ketrampilan, 2) pemahaman terhadap instruksi 3) sikap mental, dan 4) kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait.

Program PRB SMP Negeri 1 Selo bisa menjadi *role model* bagi sekolah-sekolah untuk menjadi SSB. Banyak sekolah yang rawan bencana tetapi enggan untuk melaksanakan program PRB. Selain itu adanya peningkatan kepercayaan masyarakat secara tidak langsung menjadi sarana promosi sekolah. Program PRB di SMP Negeri 1 Selo telah mewujudkan suatu manfaat nyata sebagai berikut: (1) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kebencanaan, (2) meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat, (3) menambah kompetensi dalam bidang pertolongan pertama dan (4) meningkatkan prestasi sekolah.

Secara fisik SMP Negeri 1 Selo berhasil melengkapi sarana untuk keberlanjutan program. Hal lain yang dilaksanakan adalah memasukkan program PRB kedalam RKS dan RKAS sesuai komitmen diawal program. Program PRB bermanfaat bagi pembibitan relawan di wilayah KRB. Belum ada data tentang pengembangan PRB secara mandiri. SMP Negeri 1 Selo kini resmi berpredikat sebagai Sekolah Aman Siaga Bencana Binaan PMI. Predikat ini sebagai bentuk formal dari keberhasilan dilaksanakannya program PRB. Program PRB di SMP Negeri 1 Selo telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang memerlukan perbaikan dimasa mendatang.

Pembahasan

Evaluasi *Context* program PRB

Diungkapkan oleh Triyono dkk(2013) bahwa dari lima poin yang menjadi dasar pentingnya penyelenggaraan Program Sekolah Siaga Bencana yaitu berkaitan dengan dekatnya sumber bahaya, kemampuan mengakses jalur evakuasi, perbandingan jumlah siswa dan guru, ketersediaan sarana prasarana dan pemahaman sekolah terhadap resiko bencana. Poin-poin diatas sesuai latar belakang penyelenggaraan program PRB di SMP Negeri 1 Selo. Ada tiga hal yang paling mendasar dari kebutuhan akan program yaitu dekatnya dengan berbagai sumber bencana, terbatasnya fasilitas tanggap bencana dan masih kurangnya pemahaman akan resiko bencana. Untuk perbandingan jumlah guru dan murid, terdapat 21 guru untuk menangani sebanyak 497 siswa, jadi seorang guru menangani 23 siswa. Terkait dengan penanganan rombongan belajar bukan menjadi permasalahan di SMP Negeri 1 Selo. Sedangkan untuk jalur evakuasi, SMP Negeri 1 Selo relatif mudah, karena berada pada jalur transportasi cukup besar yaitu di jalan Boyolali-Magelang. Jadi berdasarkan teori dan data penelitian tersebut SMP Negeri 1 Selo sangat penting untuk melaksanakan program PRB.

Dari penilaian pihak PMI, SMP Negeri 1 Selo perlu mendapatkan pendampingan menuju Sekolah Aman Siaga Bencana dikarenakan kebutuhan serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi bencana. Maka perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya dalam manajemen kebencanaan di sekolah. Program yang dirintis tersebut bernama Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat. Langkah ini sesuai dengan *Sendai Framework* tentang pentingnya dilaksanakan penggabungan pengetahuan tentang resiko bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi di semua bidang pendidikan baik formal maupun non-formal. Didukung pendapat Suharwoto dkk (2015)

yang menyatakan bahwa pendidikan PRB dirancang sebagai pembangunan budaya aman dan nyaman dalam masyarakat. Disebutkan pula pendidikan PRB mempunyai sasaran peserta didik dan berkontribusi ke masyarakat.

Dibutuhkannya program PRB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan sekolah aman sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Program PRB di SMP Negeri 1 Selo sejalan dengan surat edaran Mendiknas nomor.7a/SE/MPN/2010, Permendikbud No.33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB, dan panduan dari BNPB tentang Sekolah Aman Bencana melalui Peraturan Kepala BNPB No.4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Jadi dasar dari program ini sangatlah kuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan PRB. Meskipun program PRB di SMP Negeri 1 Selo merupakan inisiasi dari pihak non pemerintah yaitu PMI, namun hal ini merupakan jawaban atas kebutuhan Sekolah Aman Bencana bagi sekolah di wilayah KRB.

Tujuan implementasi program PRB di SMP Negeri 1 Selo adalah: 1) memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan dalam kesiapan menghadapi bencana, 2) memunculkan rasa tanggap, peduli terhadap lingkungan atas kerawanan wilayah terhadap bencana. Ditinjau dari Permendikbud No.33 tahun 2019, penyelenggaraan program PRB di SMP N 1 Selo telah sesuai namun masih secara garis besar. Pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan kesiapsiagaan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. PMI sebagai pihak eksternal mengemukakan tentang manfaat program PRB SMP Negeri 1 Selo bisa menjadi *role model* bagi sekolah lain. Manfaat utama dari Program PRB dapat dirasakan apabila telah benar-benar terjadi bencana. Ada manfaat tambahan yang dirasakan yaitu peningkatan prestasi sekolah. Jadi ditinjau secara teori, manfaat dari program PRB di SMP Negeri 1 Selo sesuai yang diharapkan.

Dikemukakan oleh Suharwoto, dkk (2015) PRB merupakan kegiatan jangka panjang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ada pula pernyataan yang menarik dari Kerangka Aksi Hyogo bahwasannya ketangguhan dalam pengurangan resiko bencana adalah suatu investasi. Dalam penelitian yang dilakukan Zahro dkk (2015) diungkapkan bahwa sangat penting untuk mengkaji metode yang benar dalam menanggulangi bencana. Dengan metode yang tepat maka kegiatan akan benar-benar bermanfaat. Berdasar teori dan temuan penelitian menunjukkan bahwa PRB merupakan salah satu penjaminan keberlangsungan kehidupan di masa mendatang terutama bagi masyarakat yang ada di wilayah KRB. Secara konteks program PRB di SMP Negeri 1 Selo merupakan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang seluruh warga sekolah. Menurut kriteria evaluasi *context* yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, Program PRB di SMP Negeri 1 Selo sangat sesuai dengan kebutuhan sekolah bukan hanya dorongan dari pihak eksternal, memiliki tujuan, latar belakang, dan persyaratan yang jelas untuk menyelenggarakan program. Jadi secara *context* program ini dinilai baik.

Input Program PRB

Sesuai dengan pedoman HFA, PRB bersifat interdisiplin dan menyeluruh (holistik) dan harus disertakan dalam kurikulum sekolah. Konsorsium Pendidikan Bencana (2011) mengungkapkan pembelajaran PRB terintegrasi dalam keseluruhan kurikulum pendidikan, dan tidak dilaksanakan sendiri. Dari Mendiknas (2010) PRB diharapkan masuk dalam intra maupun ekstrakurikuler, serta memperkuat jaringan dan kemitraan pihak pendukung. Kegiatan yang disusun oleh PMI telah menunjukkan kegiatan yang bersifat holistik seperti yang diharapkan bertumpu pada kebijakan, kesiapsiagaan dan aksi yang melibatkan seluruh warga sekolah. Tetapi ada yang kurang sesuai dengan harapan

Konsorsium Pendidikan Bencana, yaitu dilaksanakan dalam program tersebut secara khusus dan tidak terintegrasi pada pembelajaran. Ada kesesuaian dengan instruksi Mendiknas, pelaksanaan PRB ini sangat sesuai dengan temuan data dari aspek kebijakan yaitu penguatan ekstrakurikuler PMR dan penguatan jaringan/ kemitraan dengan pihak kepolisian, Puskesmas, masyarakat dan juga PMI.

Rencana kesiapsiagaan dalam program PRB telah sesuai Konsep Manajemen Bencana yaitu kesiapsiagaan merupakan tahap *pra-disaster* yang menekankan pada mitigasi/ upaya pengurangan resiko. Sebagaimana disampaikan oleh Djauhari, Noor (2014) kesiapsiagaan merupakan upaya mengurangi korban jiwa dan kerugian materi. Jadi jelas bahwa rangkaian kegiatan diatas sangat mendukung upaya mitigasi.

Pentingnya perencanaan dalam Program Siaga Bencana juga menjadi penekanan pada hasil penelitian dari Renatama, P.B., & Yoyon, S (2017) Sebuah pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam masalah ini harus mengkaji ancaman yang ada di sekitar. Terkait dengan perencanaan kesiapsiagaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Selo, dapat dilaksanakan dengan perancangan jalur evakuasi, pembuatan peta pelatihan dan penyusunan SOP yang harus betul-betul sesuai dengan ancaman di SMP Negeri 1 Selo. Bentuk kesiapsiagaan lain yang dilakukan dalam program PRB adalah pembentukan Tim Siaga Bencana. Tim Siaga Bencana SMP Negeri 1 Selo terpenuhi secara kuantitas dan kualitas. Penempatan personil juga telah disesuaikan dengan potensi dan fungsi masing-masing dalam manajemen sekolah. Program PRB juga mengutamakan keterlibatan siswa sehingga dibentuklah kader PMR. Pembentukan Tim Siaga Bencana menurut Humaidi dkk (2015) merupakan hal penting dalam kesiapsiagaan ditandai dengan adanya Kelompok Siaga Bencana untuk memberi penyuluhan tentang resiko bencana di

masyarakat. Disimpulkan bahwa tim Siaga Bencana berfungsi sebagai agen kesiapsiagaan di masyarakat. Begitu pula dengan keberadaannya di sekolah, tim Siaga Bencana berfungsi sebagai pelopor dan penggerak kesiapsiagaan di sekolah. Adanya tim siaga bencana di SMP Negeri 1 Selo sudah layak disebut sebagai bentuk kesiapsiagaan.

Mendiknas menginstruksikan PRB dimasukkan dalam kegiatan sekolah baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. Berarti dari segi pendanaan program PRB dapat dirancang dalam RKAS dan dibiayai oleh BOS. Selama 2 tahun program dilaksanakan, program PRB di SMP Negeri 1 Selo mendapatkan bantuan dari pihak PMI secara penuh. Namun sekolah dibimbing untuk merancang pendanaan program melalui BOS yang mana memiliki tujuan untuk keberlanjutan program secara mandiri. Hal ini tidaklah menyalahi kebijakan yang ada karena merupakan bentuk penguatan jaringan dan kemitraan dengan pihak pendukung program. Anggaran yang telah dirancang dalam RKAS dapat berfungsi sebagai cadangan ataupun peningkatan kualitas program.

Diungkapkan oleh Triyono, dkk (2013) bahwa ketersediaan sarana prasarana sekolah merupakan salah satu prioritas. Semakin terbatas ketersediaan sarana maka sekolah tersebut menjadi prioritas program PRB. Sarana prasarana secara umum telah terpenuhi di SMP Negeri 1 Selo. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut juga termasuk syarat yang harus dipenuhi kegiatan dalam program PRB. Dalam pemenuhan sarana prasarana diatas telah berhasil dipenuhi pada awal kegiatan melalui paket bantuan PMI. Dari kronologi pemenuhan sarana prasarana tersebut diambil kesimpulan bahwa sebelum adanya inisiasi dari PMI sekolah kurang memperhatikan pemenuhan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan. Pengadaan sarana tanggap bencana belum merupakan prioritas belanja pengadaan. Masih ada berbagai kekurangan

yang harus dipenuhi oleh sekolah. Antara lain belum adanya CCTV dan penyimpan daya listrik cadangan. Karena pentingnya hal tersebut semestinya segera dapat terpenuhi dengan anggaran sekolah.

Mekanisme yang jelas diperlukan para pengelola program. Adanya perjanjian kerjasama dengan pihak PMI merupakan langkah awal dari kejelasan mekanisme pelaksanaan program. Kesepakatan tersebut bersifat periodik berlaku selama 1 tahun dan kemudian diperbaiki dalam tahun berikutnya oleh kedua belah pihak jika dianggap perlu. Perencanaan program dibuat melibatkan pihak terkait dari semua unsur manajemen sekolah. PMI bersifat membantu dalam penyediaan SDM, fasilitas pelatihan, pemenuhan sarana prasarana dan penyediaan akses informasi. Dinilai dari kriteria evaluasi input yang telah ditetapkan, maka rencana kegiatan dalam Program PRB menjawab kebutuhan sekolah, sumber daya manusia yang terlibat jumlah dan kompetensinya memadai, sarana dan prasarana dan dana memadai serta memiliki mekanisme pelaksanaan kegiatan yang jelas dan rinci. Jadi secara input program PRB dinilai baik.

Process Program PRB

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berulang-ulang dengan beberapa metode. Awalnya disampaikan secara masal kemudian secara khusus terpisah bagi guru/karyawan dan para siswa. Metode tersebut dirancang untuk menyesuaikan *audiences* yang memiliki pola pikir yang berbeda. Sesuai dengan teori tentang program yang dikemukakan oleh Suharsini, A., Jabar, A., & Syafrudin, C. (2014, p. 3) yang mana mengungkapkan program sebagai rancangan dan rencana yang akan dilaksanakan. Dalam hasil penelitian diperoleh data tentang tujuan sosialisasi yang kepada guru, karyawan dan kepada siswa, atau kepada seluruh warga sekolah. Kejelasan tujuan adalah dasar penentuan metode sosialisasi untuk kesuksesan sosialisasi. Digunakannya berbagai metode

yang sesuai disini sangat tepat untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi efektif.

Menyampaikan pemberitahuan kepada pihak terkait untuk memperoleh dukungan dari pihak eksternal dalam PRB merupakan hal mutlak. Salah satu tujuan pendampingan PMI yaitu membantu sekolah memiliki akses hubungan ke pihak-pihak terkait. Sangat perlu untuk sekolah tahu tentang prosedur kemitraan apabila dalam keadaan aman dan memiliki nomor telepon darurat BNPB, PMI, Kepolisian, Puskesmas dan lain lain untuk meminta pertolongan dalam keadaan darurat. Pembangunan relasi ini sangat sesuai dengan teori tentang langkah-langkah penerapan PRB yaitu membangun kemitraan dengan pihak lain untuk pendampingan. Himbauan Mendiknas (2010) adalah untuk pembangunan kemitraan dan jaringan dengan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan PRB. Jadi tindakan yang dilakukan sekolah tersebut dapat dinilai sangat baik dan sesuai.

Pihak sekolah membentuk Tim Siaga Berbasis Sekolah yang juga merupakan struktur organisasi kebencanaan di sekolah. Tim siaga tersebut disusun menjadi beberapa bagian dengan tupoksi yang berbeda. Tugas tim siaga tersebut disesuaikan dengan kompetensi masing-masing dan didekatkan dengan fungsi mereka dalam manajemen di sekolah. Secara teori tindakan ini sesuai dengan himbauan dari Kementerian Pendidikan Nasional kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan komunitas dan potensi sekolah dan peran kelembagaan di sekolah.

Optimalisasi personil dari pihak guru, telah dibahas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amri, dkk (2017) sebagai salah satu isu utama pendidikan DDR di sekolah Indonesia yaitu permasalahan guru. Banyak guru yang kurang sadar, tidak bisa mengakses materi, kemampuan rendah guru dalam melaksanakan pendidikan DDR. Dengan dimasukkannya guru dalam organisasi tim

siaga bencana menjadikan guru aktif untuk meningkatkan kompetensi dalam kebencanaan.

Dari pembahasan tersebut kegiatan pembentukan tim siaga dapat dinilai sangat efektif dalam mendukung program secara keseluruhan. Tim siaga di SMP 1 Selo dapat terbentuk dengan baik dengan memperhatikan kompetensi dan fungsi dalam manajemen. Dominasi guru dalam tim siaga memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana.

Sekolah berhasil merangkum berbagai ancaman yang dihadapi dan kerentanan yang dimiliki. Kegiatan ini juga membekali para peserta ketrampilan tanggap bencana. Sasaran pelatihan dalam program PRB di SMP Negeri 1 Selo adalah para guru dan karyawan yang masuk dalam pengelola program dan PMR. Dalam kegiatan lain, tim P3K PMR juga mendapatkan materi evakuasi dan pertolongan pertama. Nara sumber dalam pelatihan adalah tim PMI dan tim Sibat. Sarana prasarana pelatihan semuanya dipenuhi oleh PMI. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk *workshop* dengan tuntutan sebuah produk rangkuman tentang potensi ancaman dan kerentanan yang ada di sekolah. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 33 tahun 2019, program SPAB dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi resiko bencana. Jadi adanya pelatihan ini sangat relevan dengan langkah penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang diatur dalam Permendikbud tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Renatama, P.B., & Yoyon, S (2017), menyatakan bahwa pelatihan wajib latih masyarakat di kawasan merapi, sangat cocok diterapkan apabila disesuaikan dengan kebutuhan. Pada penelitian ini juga ditemukan adanya kesesuaian materi pelatihan dengan yang ancaman yang dihadapi. Penelitian Maglangit & Mariza (2019) menyatakan pelatihan yang efektif dilakukan kepada DRRM

dan juga kepada seluruh warga sekolah. Hal ini belum dapat dilakukan di SMP Negeri 1 Selo. Sasaran pelatihan disini hanya dilakukan untuk pengelola program saja dan PMR saja. Jadi dapat dinilai pelatihan siaga bencana yang dilakukan masih belum merata untuk semua warga sekolah.

Pelatihan siaga bencana yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Selo belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. SDM, sarana prasarana dan pendanaan telah tercukupi dan berfungsi dengan baik. Namun masih ada kekurangan dari target pelatihan. Target pelatihan sangat perlu diperluas sehingga tidak hanya perwakilan saja. Tentunya hal tersebut memerlukan konsekuensi penambahan dana SDM dan waktu yang lebih lama. Hal ini dinilai menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan pelatihan PRB di SMP Negeri 1 Selo dari sisi mekanisme pelaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan dapat terlaksana dengan baik, sumber daya manusia terpenuhi dan fungsional, pendanaan tersedia dan efisien, sarana prasarana memadai dan berfungsi, pelaksanaan secara garis besar pelaksanaan mengikuti mekanisme yang ada.

Kegiatan ini untuk menilai kerentanan yang ada di sekolah meliputi : 1) identifikasi *hazard* / ancaman, 2) Identifikasi Masalah, dan 3) Identifikasi kerentanan dan kapasitas . Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chou, Jui-Sheng (2015), dalam melakukan pemetaan resiko dikaji beberapa hal penting meliputi catatan sejarah bencana, potensi bencana, faktor resiko dan kondisi lingkungan lokal. Apabila dibandingkan dengan pengkajian dalam program PRB di SMP Negeri 1 Selo, maka masih ada kekurangan yang penting untuk dibenahi yaitu tentang sejarah terjadinya bencana. Hal tersebut sangatlah penting agar para peserta untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya program. Dengan menilai sejarah dan dampak bencana identifikasi masalah juga akan menjadi lebih

detail dan valid. Kegiatan lain yang dilakukan pada kegiatan pemetaan ini adalah melakukan penentuan titik koordinat rawan bencana di lingkungan sekolah. Yaitu mengenal daerah, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul. Daerah rawan dan titik kumpul dicatat koordinatnya menggunakan GPS. Dapat dinilai kegiatan ini menunjukkan metode kesiapsiagaan yang memanfaatkan teknologi. Dalam kegiatan ini juga disebutkan bahwa secara mendalam dilatihkan untuk para PMR. Hal ini menunjukkan dorongan para pelatih agar PMR bisa melaksanakan secara mandiri dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Sejalan dengan hasil penelitian Renata Puri Bhakti yang menyebutkan tindakan PRB dilakukan secara mandiri dan kelompok dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki sangat berpengaruh positif terhadap kesiapsiagaan. Pengutamaan kerja kelompok yang disebutkan dalam penelitian diatas juga merupakan solusi pada ditemukannya hambatan dalam kegiatan pemetaan ini. Adanya hambatan yang muncul dikarenakan perbedaan *basic* pengetahuan tentang permasalahan. Hambatan tersebut dapat diatasi keterbukaan antar peserta.

Ditinjau dari hasil penelitian diatas, pemetaan risiko bencana yang telah dilakukan sangatlah sistematis. Hal itu membuktikan jelasnya mekanisme pelatihan yang dilakukan dan kompetensi SDM pada pelatihan yang baik. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Chou, Jui-Sheng (2015) menyebutkan bahwa desain pelatihan dan kinerja pelatih mempengaruhi efektifitas pelatihan. Jika dikaitkan dengan hasil pelatihan yang berupa pemetaan, kualitas pemetaan juga sangat dipengaruhi oleh dua hal tersebut. Jadi pelatihan PRB di SMP Negeri 1 Selo memiliki design dan kinerja pelatih yang baik. Dapat disimpulkan kegiatan pemetaan dapat terlaksana dengan baik, sumber daya manusia terpenuhi dan fungsional, pendanaan tersedia dan efisien, sarana prasarana memadai dan

berfungsi, pelaksanaan mengikuti mekanisme yang ada secara jelas dan rinci.

SOP sangat penting dalam penerapan sekolah siaga bencana. Dinyatakan oleh Zahro, Z.R (2015) dalam penelitiannya bahwa tidak adanya SOP dan metode penanggulangan bencana akan berdampak pada penanganan bencana yang tidak tepat sehingga berpengaruh pada jumlah korban. Berkaitan dengan pentingnya SOP tersebut, maka tepat sekali dalam program PRB ini memiliki satu kegiatan yaitu pembuatan SOP.

Penyusunan SOP dilakukan oleh tim koordinasi meliputi 3 hal yaitu prosedur pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. SOP terdiri dari Analisis Ancaman Kapasitas Kerentanan dan Resiko Bencana serta Tugas dan Tanggung Jawab. Analisis ancaman yang disusun adalah gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran dan angin kencang. Sedangkan pembagian tugas dan tanggung jawab mendefinisikan tugas kepala sekolah, guru, guru olah raga, satpam, tu dan penjaga sekolah, pengelola kantin, penjaga perpustakaan, PMR, pramuka, siswa dan OSIS. Semua memiliki tugas dan tanggung jawab tentang hal yang harus dilakukan saat pra-bencana, saat kejadian, dan pasca bencana.

Menilai berdasarkan kajian peneliti terdahulu SOP yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang mana meliputi 3 unsur manajemen bencana. Sebagaimana juga sesuai prioritas dari *Hyogo Frame Work*, kesiapsiagaan merupakan respon efektif untuk membangun kembali dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kelengkapan SOP juga memperhatikan semua unsur tersebut. Disimpulkan bahwa penyusunan SOP dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan mengikuti langkah-langkah yang telah baku. Sedangkan materi dari SOP telah mencerminkan penanganan tiga unsur manajemen bencana. Pembagian tanggung jawab merata bagi seluruh warga sekolah. Dinilai bahwa penyusunan SOP dapat

terlaksana dengan baik, sumber daya manusia terpenuhi dan fungsional.

Sebagai puncak rangkaian kegiatan dalam program PRB adalah diadakannya simulasi bencana. Simulasi dilakukan dua kali selama masa pendampingan yang melibatkan seluruh warga sekolah sedangkan PMI dan tim Sibat berperan dibalik layar. Simulasi mengikuti SOP yang telah dibuat. Dalam kegiatannya ada skenario yang disusun oleh tim koordinasi. Sarana-pasarana yang dibutuhkan terpenuhi dan terpasang dengan baik berupa alat sirine, lampu *hazard*, speaker, panah evakuasi dan penanda titik kumpul. Hal tersebut menunjukkan kesiapan simulasi yang baik dan skenario yang disusun menunjukkan kegiatan simulasi menggunakan mekanisme yang jelas.

Berdasarkan pendapat Rudolph Kent dalam Djauhari, Noor (2014) kesiapsiagaan merupakan pengambilan keputusan mulai dari gejala, gejala munculnya bencana, peringatan dini, pengembangan peringatan dini sampai pada rencana evakuasi. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian tentang simulasi di SMP Negeri 1 Selo, poin-poin kesiapsiagaan tersebut terpenuhi dengan baik dalam kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi berusaha memenuhi tuntutan kesiapsiagaan yang benar. Dengan keberhasilan simulasi, seluruh pihak yang terdampak mempunyai pengalaman untuk mengambil keputusan saat benar-benar terjadi bencana.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa simulasi adalah tepat dan diperlukan dalam kegiatan PRB. Simulasi dibutuhkan sebagai bentuk pengalaman buatan bagi warga sekolah dalam menghadapi bencana. SMP Negeri 1 Selo telah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan tuntutan kesiapsiagaan. Sedangkan dukungan dari faktor SDM dan prasarana dapat dinilai baik, didukung skenario yang baik sebagai kejelasan mekanisme. Jadi kegiatan simulasi bencana dapat terlaksana dengan baik,

sumber daya manusia terpenuhi dan fungsional, pendanaan tersedia dan efisien, sarana prasarana memadai dan berfungsi, pelaksanaan mengikuti mekanisme yang ada secara jelas dan rinci.

Kegiatan yang kurang sesuai dengan teori menyebabkan satu kegiatan tidak maksimal karena pelatihan belum menyeluruh terhadap seluruh warga sekolah. Adanya pelaksanaan yang kurang sesuai dengan perencanaan menjadikan kegiatan kurang efektif yang terdapat pada unsur pendanaan. Secara jumlah telah dapat memenuhi kebutuhan kegiatan, namun dengan adanya dobel anggaran menjadikan dana tidak efisien. Kesimpulan dari pembahasan proses adalah sebagian besar kegiatan (3-5 kegiatan) terlaksana dengan baik, SDM terpenuhi dan fungsional, pendanaan tersedia tapi kurang efisien, ada kekurangan pada sarana prasarana dan secara garis besar pelaksanaan mengikuti mekanisme yang ada. Dilihat dari kriteria yang telah ditentukan maka proses PRB di SMP Negeri 1 Selo dinilai cukup.

Product Program PRB

Program PRB mampu meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan berupa peningkatan kompetensi yaitu pengetahuan dan ketrampilan, pemahaman terhadap instruksi, sikap mental, dan komunikasi dengan pihak terkait. Manfaat utama program PRB dapat dirasakan pada saat benar-benar terjadi bencana dan hanya sedikit manfaat langsung, sebagaimana diungkapkan oleh Astuti, S.I., & Sudaryono (2010). Manfaat penerapan PRB di sekolah dapat dilihat dari respon individu dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurut Djauhari, Noor (2014) adanya penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana juga dapat menjadi manfaat pokok dari program PRB.

Kegiatan dalam program PRB telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Selo. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan program PRB dalam masa pembinaan PMI

selama dua tahun. Setelah berakhirnya program pendampingan SMP Negeri 1 Selo kini resmi berpredikat Sekolah Aman Siaga Bencana Binaan PMI. Secara fisik SMP Negeri 1 Selo berhasil melengkapi sarana prasarana tanggap bencana sesuai kemampuan. Sedangkan hasil secara non fisik, SMP Negeri 1 Selo menjadi juara umum pada jumbata tingkat kabupaten. PMI juga mendapatkan manfaat pembibitan relawan di wilayah desa masing-masing. Dari pencapaian diatas dinilai bahwa kompetensi siswa meningkat, dengan adanya bibit relawan baru berarti kepedulian warga juga meningkat.

Belum ada hasil pengembangan program PRB secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya peningkatan sikap dan kepedulian warga sekolah. Dampak yang dapat dirasakan adalah peningkatan manajemen kesiapsiagaan bencana di sekolah. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Dampak lain yang dirasakan adalah peningkatan kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 Selo. Dinilai dari evaluasi produk, sebagian besar program PRB tercapai, pengetahuan warga terhadap resiko bencana dan ketrampilan warga dalam menghindari bencana meningkat secara signifikan, serta memiliki dampak yang cukup besar bagi sekolah. Namun sikap/kepedulian warga sekolah terhadap bencana belum meningkat secara signifikan. Dengan demikian produk dari program PRB di SMP Negeri 1 Selo dinilai cukup.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Konteks program Pendidikan PRB di SMP Negeri 1 Selo termasuk kategori baik, karena sesuai dengan kebutuhan sekolah bukan hanya dorongan dari pihak eksternal, memiliki tujuan, latar belakang, dan persyaratan yang jelas untuk menyelenggarakan. Input program Pendidikan PRB di SMP Negeri 1 Selo termasuk kategori baik, karena dapat menjawab

kebutuhan sekolah, sumber daya manusia jumlah dan kompetensinya memadai, sarana dan prasarana dan dana memadai serta memiliki mekanisme jelas dan rinci. Program PRB dilaksanakan dengan tujuan yang jelas. Sumber daya manusia dapat terpenuhi dari tim siaga bencana sekolah, tim PMI dan tim Sibat, sehingga secara kuantitas dan kualitas dapat terpenuhi. Keterlibatan PMR juga sangat mendukung keberlangsungan program. Sarana prasarana yang dibutuhkan mayoritas terpenuhi dari PMI dalam masa pendampingan. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan belum adanya penjadwalan jelas sehingga sering harus menyesuaikan dengan kegiatan sekolah lainnya. Dinilai dari evaluasi produk, sebagian besar program PRB tercapai, pengetahuan warga terhadap resiko bencana dan ketrampilan warga dalam menghindari bencana meningkat secara signifikan namun sikap/kepedulian warga sekolah terhadap bencana belum meningkat secara signifikan serta memiliki dampak yang cukup besar bagi sekolah. Dengan demikian produk dari program PRB di SMP Negeri 1 Selo dinilai cukup.

Saran

Disarankan sekolah mengadakan perbaikan Program PRB melalui langkah-langkah praktis dengan menjadikan masalah tanggap bencana masuk dalam visi dan misi sekolah, memasukkan kegiatan PRB kedalam kalender pendidikan, memasukkan anggaran kegiatan PRB kedalam RKAS dan mengalokasikan belanja untuk sarana prasarana tanggap bencana. Para pengelola program memperbaiki semua komponen dalam program PRB secara periodik dengan pembaharuan administrasi berupa komitmen sekolah, struktur Tim Siaga Bencana, penguatan kemitraan dengan pihak eksternal dan merancang penjadwalan secara terperinci. Bagi PMI dan TIM Sibat, tetap melanjutkan pendampingan dengan penyempurnaan hubungan kerja sama

terutama, pembinaan SDM dan pendanaan mengingat banyak manfaat yang diperoleh dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, O; Chakma, J., & Mahbub, A. (2012). Continuing Education in Disaster-Affected Schools in Bangladesh: An Evaluation of the Education in Emergencies Project. *Children, Youth and Environments, University of Cincinnati*, 22(2), 249–262. <https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.22.2.0249>
- Amri, A; Deanne, K.B.; Ronan, K; Haynes, K; & Towers, B. (2017). Disaster risk reduction education in Indonesia: challenges and recommendations for scaling up. *Natural Hazard and Earth System Science*, 17, 595–612. <https://doi.org/10.5194/nhess-17-595-2017>
- Aprilin, H., Haksama, S., & M. (2018). Kesiapsiagaan Sekolah Terhadap Potensi Bencana Banjir di SDN Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Biosain Pascasarjana*, 20(2).
- Apronti, P.T., Osamu, S., Otsuki, K., & Berisavljevic, G. (2015). Education for Disaster Risk Reduction (DDR): Linking Theory With Practice in Ghana's Basic School. *Journal of Sustainability*, 7(7), 9160–9186.
- Astuti, S. I., & S. (2010). Peran Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 1(1), 30-42.
- Peraturan Kepala BNPB No.4 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana, (2012).
- Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030, (2015).

- Djauhari, N. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Deeppublish.
- Jui-Sheng Chou, Kuo-Hsin Yang, T.-C. R. (2015). Ex-Post Evaluation Of Preparedness Education In Disaster Prevention, Mitigation And Response. *International Journal of Risk Reduction*, 12, 188–120.
- Maglangit, & Mariza, M. (2019). Disaster and Risk Reduction Preparedness Evaluation of the 6th District schools of Lapu-Lapu City. *American Journal of Humanities and Social Science Research (AJHSSR)*, 3, 203–206.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, (2019).
- Renatama, P.B., & Yoyon, S. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Wajib Latih dan Gladi Lapang Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Merapi. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 192–202.
- Suharsimi, A., Jabar, A., & Safrudin, C. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Suharwoto, G., Nurwin, Nur'amiaty, T.D., D. (2015). *Modul 3. Pilar 3 – Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
- Triyono, Suartari, G.A.K., Putri, R.B., & Koswara, A. (2012). *Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana*. Compress-LIPI.
- Triyono, Suartari, G.A.K., Putri, R.B., & Koswara, A. (2013). *Naskah Kebijakan Penerapan Sekolah Siaga Bencana di Indonesia*. Compress-LIPI.
- Zahro, Z.R., Andriningrum, H., Sari, E.P., & Gunawan, I. (2015). Sekolah Siaga Bencana: Kajian Evaluatif Kesiapsiagaan Sekolah Menghadapi Bencana. *Prosiding Seminar Nasional. Sinergitas Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Dalam Penguatan Pendidikan Karakter*.